



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI BAGI ANAK
TAHUN 2016 – 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak mendapatkan jaminan untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa pornografi yang sudah menyebar di masyarakat sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak, sehingga perlu dicegah penyebarluasannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengamanatkan pemerintah daerah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi;
- d. bahwa upaya pencegahan penyebarluasan pornografi yang berpengaruh terhadap anak dan penanganannya perlu melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat, sehingga perlu disusun suatu Rencana Aksi Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Pornografi bagi Anak Tahun 2016 - 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (*Optional Protocol to The Convention On The Rights of The Child on the Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi Tahun 2013 -2017;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI BAGI ANAK TAHUN 2016 – 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Pornografi bagi Anak Tahun 2016 – 2020, yang selanjutnya disebut RAD Pencegahan dan Penanganan Pornografi bagi Anak, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah sekaligus menindak berbagai masalah pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang berdampak negatif serta mengganggu tumbuh kembang anak.
2. Pencegahan Pornografi bagi Anak adalah segala upaya dan tindakan menghindari agar setiap anak tidak mengakses (melihat, mendengar, memperagakan) pornografi dengan menghilangkan segala sesuatu yang dapat mempermudah untuk mengakses sumber-sumber pornografi, sekaligus mencegah agar mereka tidak menjadi korban pornografi.
3. Penanganan Pornografi bagi anak adalah tindakan memberikan pertolongan bagi anak yang menjadi korban pornografi.
4. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 2

RAD Pencegahan dan Penanganan Pornografi bagi Anak bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan komitmen semua unsur masyarakat dalam pencegahan pornografi bagi anak;
- b. membangun dan menjalin kerja sama, koordinasi dan hubungan kerja yang baik dengan semua unsur masyarakat dalam pencegahan pornografi bagi anak;
- c. mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang mampu melindungi anak dari pengaruh negatif pornografi; dan
- d. melakukan koordinasi dalam menangani permasalahan yang timbul dari dampak pornografi pada anak.

Pasal 3

Rincian RAD Pencegahan dan Penanganan Pornografi bagi Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) RAD Pencegahan dan Penanganan Pornografi bagi Anak dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD Pencegahan dan Penanganan Pornografi bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyesuaikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 5

- (1) RAD Pencegahan dan penanganan Pornografi bagi Anak dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah terkait, kantor wilayah, unit layanan perempuan dan anak, organisasi perempuan dan pemerhati anak, lembaga penyiaran publik di daerah, pengurus sekolah, pengurus keagamaan, dan unsur masyarakat lainnya.
- (2) Koordinasi pelaksanaan RAD Pencegahan dan penanganan Pornografi bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi dan kelompok kerja lainnya yang telah dibentuk untuk melindungi anak.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Januari 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PORNOGRAFI BAGI ANAK TAHUN 2016 - 2020

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI BAGI ANAK TAHUN 2016 – 2020

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
1	Badan/Dinas penyelenggara urusan perlindungan anak (BPPM DIY dan PP Kab/Kota)	Kampanye anti pornografi	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pornografi		v	v	v	v	Kampanye dapat berupa/melalui : a. gerakan anti pornografi; b. leaflet, spanduk; dan c. media elektronik
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pornografi (UU No. 44 Tahun 2008, PP No. 40 Tahun 2011)	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundangan yang terkait pornografi	v	v	v	v	v	Sosialisasi melalui : a. kegiatan TP PKK (kab/kp) b. kegiatan Forum Anak Pelayanan melalui P2TPAKK dan FPKK

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan Pornografi Anak	Terkoordinasinya pelaksanaan Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan Pornografi Anak	v	v	v	v	v	
		Sosialisasi bahaya pornografi anak dengan Forum Anak dan masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pornografi	v	v	v	v	v	
		Menyediakan dan melatih SDM untuk penanganan korban pornografi	Terciptanya SDM yang terlatih dalam penanganan korban pornografi	v	v	v	v	v	
		Melakukan pendataan anak korban/pelaku pornografi	Data anak korban/pelaku pornografi		v		v		
		Membuat kebijakan terkait perlindungan anak terhadap dampak pornografi	Adanya kebijakan perlindungan anak terhadap dampak pornografi	v					

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Advokasi warnet sehat	Munculnya kesadaran pengelola warnet terhadap dampak pornografi	v		v		v	
2	Dinas Kominfo DIY	Menyiapkan sarana yang dapat memblokir laman (<i>website</i>) berkonten pornografi	Adanya sarana yang dapat memblokir laman (<i>website</i>) berkonten pornografi	v	v	v	v	v	
		Berkoordinasi dengan lembaga penyiaran publik baik media cetak maupun media siaran untuk melakukan tindakan tegas bagi lembaga penyiaran dan perusahaan pers daerah yang memberikan informasi tidak layak bagi anak.	Lembaga pengawas penyiaran publik baik media cetak maupun elektronik melakukan tindakan tegas bagi lembaga penyiaran, perusahaan pers yang memberikan informasi tidak layak bagi anak.	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Melakukan pembinaan kerjasama dengan penyelenggara jasa akses internet untuk memblokir situs internet bernuansa negatif, khususnya pornografi	Penyelenggara jasa akses internet dapat memblokir situs internet bernuansa negatif, khususnya pornografi	v	v	v	v	v	
		Melakukan kerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, agar setiap penyelenggara jasa internet menggunakan penyaring kontens bermuatan negatif khususnya konten pornografi.	Adanya kerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Menyediakan akses internet sehat dan aman serta mengembangkan program internet sehat dan aman (INSAN) menuju insan yang cerdas, kreatif dan produktif	Adanya akses internet sehat dan aman serta pengembangan program internet sehat dan aman (INSAN) yang bermanfaat bagi anak	v	v	v	v	v	
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pornografi (UU No. 44 Tahun 2008, PP No. 40 Tahun 2011, Perpres No. 25 Tahun 2015	Adanya pemahaman tentang substansi Undang -Undang Nomor 44 tahun 2008.	v	v	v	v	v	
3	Dinas Perhubungan DIY	Sosialisasi terhadap operator dalam pencegahan tindakan ke arah pornografi dalam penyelenggaraan angkutan umum	Mengurangi tindakan ke arah pornografi dalam penyelenggaraan angkutan umum	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
4	Disdikpora DIY	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap buku-buku berkonten pornografi di lingkungan satuan pendidikan	Monitoring dan evaluasi terhadap buku-buku berkonten pornografi di lingkungan satuan pendidikan.	v	v	v	v	v	
		Sosialisasi tentang bahaya pornografi bagi lembaga pendidikan dan siswa di lingkungan satuan pendidikan.	Meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan kesadaran siswa dan lembaga pendidikan tentang bahaya pornografi		v	v	v	v	
		Mendorong satuan pendidikan untuk membentuk kelompok sebaya (<i>peer group</i>) yang dapat berperan memberikan pemahaman kepada siswa sekolah tentang bahaya pornografi bagi anak	Adanya kelompok sebaya (<i>peer group</i>) yang dapat berperan memberikan pemahaman kepada siswa sekolah tentang bahaya pornografi bagi anak	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Bekerja sama dan berkoordinasi dengan pengurus sekolah untuk melakukan pengawasan penyebaran buku atau media elektronik yang memuat pornografi di satuan pendidikan	Terlaksananya pengawasan penyebaran buku atau media elektronik yang memuat pornografi di satuan pendidikan	v	v	v	v	v	
		Memberikan pendampingan, bimbingan dan konseling terhadap anak korban pornografi di bawah pengawasan guru pembimbing di satuan pendidikan dan melalui kegiatan ekstrakurikuler	Adanya pendampingan, bimbingan dan konseling terhadap anak korban pornografi di bawah pengawasan guru pembimbing di satuan pendidikan dan melalui kegiatan ekstrakurikuler	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Sosialisasi, edukasi syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, penggunaan produk pornografi untuk tujuan pendidikan	Peningkatan pemahaman tentang syarat dan tata cara perijinan pembuatan, penyebarluasan, penggunaan produk pornografi untuk tujuan pendidikan	v		v		v	
		Sosialisasi bahaya pornografi bagi anak kepada kelompok pelajar	Peningkatan kesadaran kepada kelompok pelajar tentang bahaya pornografi	v	v	v	v	v	
		Pengembangan kesadaran pemuda terhadap faktor destruktif Pornografi	Terlatihnya para konselor muda di daerah yang akan memberikan penyuluhan kepada generasi muda untuk memiliki ketahanan/ imunitas dari dampak negatif dari pornografi	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Sosialisasi terhadap pemuda dan olahragawan tentang bahaya pornografi bagi anak, remaja dan pemuda	Adanya kesadaran dari pemudan dan olahragawan tentang bahaya pornografi tentang bahaya pornografi	v	v	v	v	v	
		Membangun ketahanan/imunitas generasi muda terhadap dampak negatif media dan perilaku menyimpang di masyarakat	Terbentuknya ketahanan generasi muda terhadap dampak media dan perilaku menyimpang di masyarakat		v		v		
		Menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk memilih pesan media yang berdampak positif dengan menghindari pesan media berdampak negatif seperti pornografi	Terbangunnya kesadaran generasi muda untuk memilih semua pesan media yang berdampak positif dengan menghindari dampak negatif seperti pornografi	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
5.	Kanwil Agama DIY	Sosialisasi tentang UU No. 44 Tahun 2008	Meningkatnya pemahaman tentang substansi UU No. 44 Tahun 2008	v	v	v	v	v	
		Sosialisasi bahaya pornografi bagi penyuluh agama, pemuka agama dan lembaga keagamaan	Meningkatkan pemahaman tentang bahaya pornografi bagi penyuluh agama dan pemuka agama dan lembaga keagamaan	v	v	v	v	v	
6.	Dinas Sosial DIY	Sosialisasi bahaya pornografi serta pencegahan kepada kelompok orang berkebutuhan khusus	Adanya pemahaman terhadap pornografi bagi anak berkebutuhan khusus	v	v	v	v	v	
		Memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban/pelaku pornografi	Adanya pendampingan terhadap anak korban/pelaku pornografi oleh pekerja sosial	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Memberikan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam pencegahan pornografi anak	Adanya peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam pencegahan pornografi anak	v		v		v	
		Meningkatkan peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam upaya pencegahan, pemulihan dan pendampingan korban/pelaku pornografi anak	Adanya layanan pencegahan, pemulihan dan pendampingan psikososial dan pekerja sosial/psikolog di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	v	v	v	v	v	
		Pengintegrasian pencegahan pornografi anak dalam bimbingan dan asistensi keluarga	Adanya pembinaan pencegahan pornografi anak dalam setiap keluarga di DIY	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
7.	Kepolisian Daerah DIY	Sosialisasi tentang implementasi peraturan perundang-undangan terkait pornografi kepada anggota Polda DIY	Anggota Polda DIY yang profesional dalam penanganan kasus pornografi	v	v	v	v	v	
		Mengadakan pendidikan dan pelatihan, seminar, <i>in houses training</i> penanganan terhadap kasus pornografi kepada anggota Polda DIY	Anggota Polda DIY yang profesional dalam penanganan kasus pornografi	v		v		v	
		Melakukan pendataan kasus-kasus pornografi	Data kasus-kasus pornografi	v		v		v	
		Meningkatkan peran kepolisian dalam razia terhadap produsen, distributor dan perdagangan atau pengecer produk pornografi	Berkurangnya disktributor, pedagang/ pengecer produk pornografi	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap kasus penyebarluasan pornografi	Menimbulkan efek jera bagi pelaku	v	v	v	v	v	
		Melakukan sosialisasi (ceramah, pembuatan spanduk, selebaran, dll) kepada masyarakat terhadap bahaya pornografi dan sanksi hukum bagi pelaku pornografi	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pornografi	v	v	v	v	v	
		Menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menangani kasus pornografi	Terjalinnya sinergitas kemitraan dengan masyarakat terhadap bahaya pornografi	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap warnet yang menyediakan jasa pornografi	Pengawasan dan penindakan terhadap warnet yang menyediakan jasa pornografi	v	v	v	v	v	
		Melakukan pemetaan penyebarluasan pornografi di daerah	pemetaan penyebarluasan pornografi di daerah	v		v		v	
8.	Kanwil Hukum dan HAM DIY	Meneruskan pencegahan pornografi anak dalam kebijakan di bidang teknis pembinaan mental dan rohani bagi anak	Terintegrasikannya pencegahan pornografi anak dalam kebijakan di bidang teknis pembimbingan mental dan rohani bagi anak	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Meneruskan pencegahan pornografi anak dalam pembinaan mental dan rohani anak di lembaga pemasyarakatan anak	Terintegrasinya pencegahan pornografi anak dalam pembimbingan mental dan rohani anak di lembaga pembinaan khusus anak dan balai pemasyarakatan	v	v	v	v	v	
		Meneruskan pencegahan pornografi anak dalam pembinaan terhadap anak berhadapan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan Anak	Terintegrasikannya pencegahan pornografi anak dalam pembinaan terhadap anak berhadapan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan Anak	v	v	v	v	v	
		Larangan penggunaan ponsel di lembaga pemasyarakatan anak	Adanya regulasi tentang penggunaan ponsel di lembaga pemasyarakatan anak	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
9.	Lembaga Perlindungan Anak di DIY	Mengintegrasikan pencegahan pornografi anak melalui penelitian perlindungan anak korban eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi	Terintegrasikannya pencegahan pornografi anak melalui penelitian perlindungan anak korban eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi	v			v		
		Pengumpulan data dan informasi anak korban atau pelaku pornografi	Data dan informasi anak korban atau pelaku pornografi.	v		v		v	
		Menerima pengaduan masyarakat tentang kasus pornografi anak	Data pengaduan masyarakat tentang kasus pornografi anak	v	v	v	v	v	
		Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyelenggaraan layanan anak di daerah yang menjadi korban atau pelaku pornografi	Laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan layanan anak di daerah yang menjadi korban atau pelaku pornografi	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Pendampingan dan penguatan anak korban dan pelaku anak terkait dengan pornografi	Terdampinginya penguatan anak korban dan pelaku anak terkait dengan pornografi	v	v	v	v	v	
10.	KPID DIY	Memantau (mengawasi) seluruh program acara (siaran) yang ditayangkan oleh seluruh stasiun televisi dan radio se-DIY selama 24 jam.	Perlindungan terhadap masyarakat termasuk anak-anak dan remaja dari dampak negatif (atas pornografi) dalam program siaran televisi dan radio	v	v	v	v	v	
		Melakukan program literasi media dan literasi regulasi media terhadap masyarakat akan bahaya serius dari tayangan pornografi di media massa	Terciptanya masyarakat yang cerdas dalam bermedia dan memberikan kesadaran kritis kepada anak-anak dan remaja untuk mengonsumsi tayangan/siaran yang sehat dan bermutu baik	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Memberikan sanksi kepada seluruh lembaga penyiaran (publik, swasta, berlangganan, maupun komunitas) yang menyiarkan tayangan berkonten pornografi	Adanya efek jera kepada pengelola media penyiaran yang menayangkan program siaran berkonten pornografi.	v	v	v	v	v	
		Menerbitkan media cetak maupun daring (<i>online</i>) yang berisi sosialisasi mengenai dampak negatif tayangan pornografi terhadap anak dan remaja.	Terbitnya media cetak maupun daring (<i>online</i>) secara berkala yang memberikan informasi jelas mengenai dampak negatif tayangan pornografi terhadap anak dan remaja	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Menggelar diskusi publik baik yang ditayangkan langsung di media penyiaran maupun <i>“off air”</i> dengan mengundang berbagai narasumber yang memiliki kepedulian tinggi dalam bidang mengatasi masalah pornografi.	Adanya diskusi publik secara berkala baik yang ditayangkan langsung di media penyiaran maupun tidak dengan mengundang berbagai narasumber yang memiliki kepedulian tinggi dalam bidang mengatasi masalah pornografi	v	v	v	v	v	
11	Dinas Kesehatan DIY	Sosialisasi bahaya pornografi	Meningkatkatnya pemahaman tentang bahaya pornografi	v	v	v	v	v	
		Sosialisasi tentang bahaya pornografi kepada tenaga kesehatan	Meningkatnya pemahaman bahaya pornografi kepada tenaga kesehatan	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Melakukan pemulihan kesehatan fisik dan psikis dari segi intelegensia bagi anak korban kekerasan karena pengaruh pornografi	Pulihnya kesehatan fisik dan psikis dari segi intelegensia anak korban kekerasan karena pengaruh pornografi	v	v	v	v	v	
12	BKKBN DIY	Memfasilitasi kelompok remaja tentang bahaya pornografi lewat kelompok remaja/ mahasiswa di sekolah	Adanya fasilitasi kelompok remaja tentang bahaya pornografi	v	v	v	v	v	
		Memfasilitasi Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dalam pembinaan dan penyuluhan pengasuhan balita dan anak pada orang tua	Adanya fasilitasi penyuluhan kepada orang tua untuk menyiapkan generasi emas dengan materi: a. membentuk karakter sejak dini;	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
			b. menjaga kesehatan reproduksi; dan c. menjaga anak dari pengaruh media						
		Memfasilitasi kelompok bina keluarga remaja dalam pencegahan bahaya pornografi pada remaja	Peningkatan dan perubahan pengetahuan sikap dan perilaku remaja terhadap bahaya pornografi	v	v	v	v	v	
		Penguatan ketahanan keluarga dalam pencegahan pornografi anak	Adanya penguatan ketahanan keluarga dalam pencegahan pornografi anak	v	v	v	v	v	
13.	Tim Penggerak PKK D.I. Yogyakarta	Perumusan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Panduan dan Pedoman Pencegahan Pornografi terhadap anak	Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Panduan dan Pedoman Pencegahan Pornografi terhadap anak	v					

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Sosialisasi tentang pencegahan pornografi melalui penyadaran keluarga	Pemahaman dalam upaya merubah mindset yang merupakan bencana bagi generasi muda bangsa	v	v	v	v	v	
14.	BKOW DIY	Mendorong organisasi perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi bahaya pornografi	Adanya pemahaman organisasi perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang bahaya pornografi	v		v		v	
		Melaksanakan seminar tentang pornografi kepada anggota Kowani.	Terlaksananya seminar tentang pornografi anak dengan anggota Kowani	v		v		v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
		Pengintegrasian pencegahan pornografi anak melalui peningkatan kesadaran moral masyarakat dan ketahanan keluarga	Terintegrasinya pencegahan pornografi anak melalui peningkatan kesadaran moral masyarakat dan ketahanan keluarga	v	v	v	v	v	
		Sosialisasi pencegahan pornografi anak kepada anggota Dharma Wanita Persatuan DIY	Meningkatnya pemahaman anggota Dharma Wanita Persatuan DIY tentang pencegahan pornografi anak	v	v	v	v	v	
15	Forum Anak Daerah (FAD) dan FA (Forum Anak) Kabupaten	Kampanye anti pornografi	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pornografi	v	v	v	v	v	
		Sosialisasi pencegahan pornografi anak	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai upaya pencegahan pornografi anak	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
16.	Perguruan Tinggi/PSW UGM	Sosialisasi tentang Pencegahan pornografi melalui PKK se-DIY	Meningkatnya pemahaman anggota PKK se-DIY tentang upaya pencegahan pornografi	v	v	v	v	v	
17.	LSM Pemerhati Anak/LSPPA DIY	Kampanye anti pornografi	Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pornografi	v	v	v	v	v	
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pornografi (UU No. 44 Tahun 2008, PP No. 40 Tahun 2011)	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundangan terkait pornografi	v	v	v	v	v	
		Sosialisasi pencegahan pornografi anak	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya pencegahan pornografi anak	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
18.	Dinas Kebudayaan DIY	Menumbuh kembangkan sarana dan pra sarana lokal untuk pencegahan pornografi terhadap anak	Adanya sarana dan pra sarana lokal untuk pencegahan pornografi terhadap anak	v	v	v	v	v	
		Mensosialisasikan bahaya pornografi melalui seni, tradisi dan budaya	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pornografi	v	v	v	v	v	
19.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	Sosialisasi program pencegahan dan penanganan pornografi pada pekerja anak dalam kegiatan PPA – PKH	Meningkatkan pemahaman pekerja anak tentang pencegahan pornografi	v	v	v	v	v	

NO.	INSTITUSI	KEGIATAN	OUTPUT	TAHUN					KETERANGAN
				2016	2017	2018	2019	2020	
20.	Satpol PP DIY	Penegakan peraturan perundang-undangan terkait pornografi	Terlaksananya peraturan perundang-undangan terkait pornografi	v	v	v	v	v	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001